



Kecamatan Akan Kelola Danais

Personel Terbatas, Siap Pontang-panting

JOGJA, Radar Jogja - Pada 2020 nanti, kecamatan di Kota Jogja tak sekadar berubah nama menjadi Kemantren. Tapi juga akan ikut mengelola dana keistimewaan (Danais). Itu seiring dengan diajukannya rancangan peraturan daerah (Raperda) Kelembagaan Kota Jogja.

Apakah kecamatan sudah siap? Camat Umbulharjo, Rumpis Tri Mintarta mengaku tak keberatan dengan adanya tambahan tugas dan kewenangan selain tugas atributifnya sesuai PP 17/2018 tentang kecamatan. "Pada prinsipnya kami siap saja," katanya kemarin (5/11).

Meski juga saat ini, sesuai dengan Perwal nomor 14 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat, kecamatan juga mengurus, perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, mediasi, penyelenggaraan dan kewenangan lain. Ditambah lagi mulai tahun ini juga mengelola dana kelurahan. Di wilayah Umbulharjo ada tujuh kelurahan.

Hal itu menambah tugas pengelolaan anggaran. Saat ini di ke-



Rumpis Tri Mintarta

camatan Umbulharjo mengelola anggaran dari APBD sebesar Rp 12,632 miliar. Jika ditambah dana kelurahan, yang tiap kelurahan mendapat anggaran Rp 352,941 juta, di wilayah kecamatan Umbulharjo mengelola Rp 2,47 miliar. Untuk danais? "Kalau danais belum bisa matur," ungkapnya.

Rumpis mengaku, telah menyampaikan pada hasil rapat dengar pendapat dengan Pansus kelembagaan agar bisa menambah personil. Minimal lebih dari tiga seksi terutama untuk kelurahan. Hal ini untuk mengampu ketika nanti kewenangan keistimewaan diserahkan atau sebagian kewenangan itu ada di kecamatan dan kelurahan. "Kalau di bawah tidak ada penambahan ya pontang panting," ujarnya. "Tapi pada dasarnya kami siap walau harus kepon-tal-pontal dalam pengelolaan

keuangan karena tidak ada personilnya," tambahnya.

Rumpis menyebut seluruh personil di tujuh kelurahan, kecamatan Umbulharjo ada 42 orang pejabat dan struktural. Sedangkan di kecamatan sendiri sekitar 20 an orang termasuk dengan tenaga bantu dan teknis. Jika melihat struktur organisasi di tiap kelurahan saat ini bahwa antara seksi satu dengan yang lainnya beban tugasnya tidak seimbang. "Kalau kami lihat analisa jabatan dan formasi baru terpenuhi 60 persen. Jadi ada yang mengampu beberapa bidang ketugasan," jelasnya.

Sedang Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jogja, Octo Noor Arafat menyebut, sesuai dengan arahan dari Paniradya Keistimewaan DIJ untuk kecamatan di wilayah kota Jogja hanya akan lebih fokus pada aspek kebudayaan. "Karena terkait dengan pertanahan dan tata ruang sudah ada perda yang mengatur detailnya," ujarnya.

Menanggapi soal personil katanya tetap menyesuaikan dengan perda yang ada. Octo mengaku nantinya juga akan disampaikan saat pembahasan raperda di DPRD Kota. "Nanti perda mengatur tentang kelembagaan kota, kecamatan dan kelurahan akan seperti apa," tuturnya. (cr15/pr/er)

Dengan BKK, Sampai ke Desa dan Dukuh

PENYERAPAN danais pada tahun depan akan dialokasikan di seluruh kabupaten kota di DIJ. Harapannya Danais juga bisa dirasakan hingga tingkat padukuhan. Alokasi Danais melalui skema Bantuan Khusus Keuangan (BKK). "Tahun ini baru dialokasikan di dua kabupaten, yaitu Kulonprogo dan Gunungkidul," jelas Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIJ Beny Suharsono kemarin (4/11).

Menurut dia, pemanfaatan Danais akan terus dievaluasi hingga penerapannya bisa memasuki level desa atau menyentuh akar rumput. Ini dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hingga mengurangi angka kemiskinan di DIJ melalui stimulus Danais. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing serta peningkatan kapasitas.

Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan APBD adalah Danais khusus untuk membiayai urusan keistimewaan. Misalnya kebudayaan sebagai salah satu bidang keistimewaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Skemanya kebudayaan melalui pem-

berdayaan, karena budaya itu hak cipta, karsa, karya dan hasil karya itu menjadi sangat luas," jelasnya.

Dia mencontohkan, dinas koperasi maupun dinas perdagangan-pun bisa mengakses urusan kebudayaan. Asalkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. "Tidak bisa untuk memberikan santunan langsung pada masyarakat miskin. Tapi melalui pemberdayaan," tuturnya.

Terpisah Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana juga menyebut, harusnya danais bisa dialokasikan hingga desa dan dusun. Menurut dia, penyebaran danais itu penting agar masyarakat bisa merasakan keistimewaan DIJ. "Tujuan keistimewaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengurangi kemiskinan," ujarnya.

Tentang perangkat daerah maupun PNS, Huda meminta mereka bisa menyesuaikan ketugasan. Termasuk dengan kemampuan dalam mengelola anggaran. "SDM di DIJ itu sudah sangat baik, tinggal ditambah arahan sedikit akan sangat baik hasilnya," kata dia. (cr16/pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005